

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Permasalahan mengenai kualitas laporan keuangan kini semakin marak dibicarakan karena terdapat banyak kasus mengenai buruknya kualitas suatu laporan keuangan itu sendiri tidak terkecuali pada laporan keuangan pemerintah daerah, terbukti dengan masih banyaknya penyimpangan yang ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang dipengaruhi oleh beberapa faktor. Penyusunan laporan keuangan diperlukan guna memberikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi sehingga laporan keuangan menjadi suatu alat yang sangat berguna untuk membantu proses pengambilan keputusan (Desiana, 2014).

Pada sektor pemerintahan, penyusunan laporan keuangan merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk mempertanggungjawabkan aktivitas keuangannya kepada publik atau masyarakat, sehingga kandungan informasi dalam laporan keuangan pemerintah harus berkualitas. Laporan keuangan pemerintah dikatakan berkualitas apabila laporan keuangan yang disajikan setiap tahunnya mendapat penilaian berupa Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK (Purnomo, 2014).

Ketika BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) maka dapat dikatakan bahwa laporan keuangan suatu entitas tersebut disajikan dan diungkapkan secara baik dan wajar. Sebagaimana yang telah diatur di dalam UU

No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa yakni: Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak memberi opini (BPK RI, 2016).

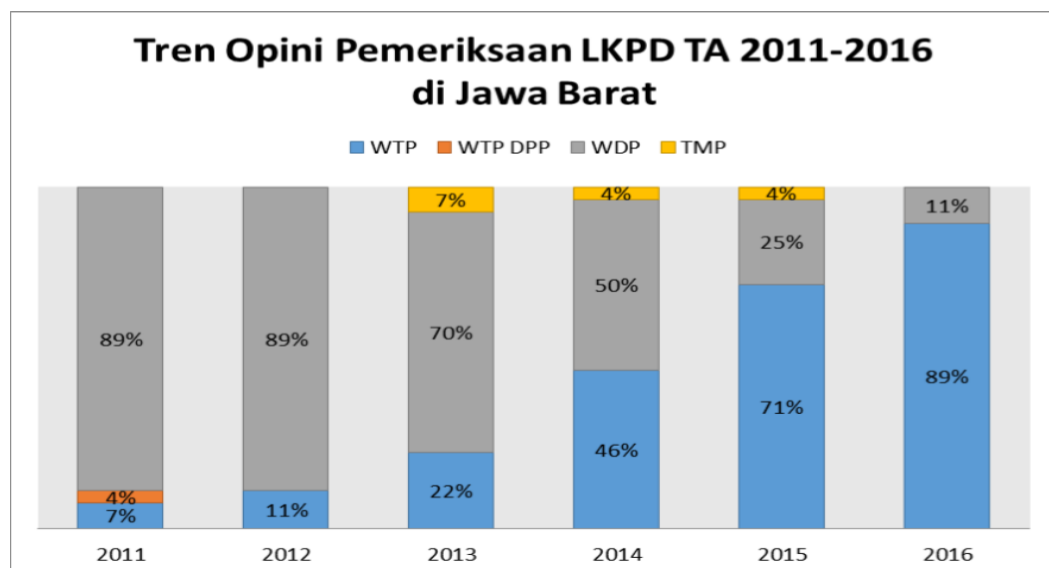
Karakteristik kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Laporan keuangan yang berkualitas memenuhi beberapa karakteristik yaitu relevan (berhubungan dengan kegunaan informasi dalam pengambilan keputusan), andal (bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material dan dapat diandalkan oleh pemakainya), dapat dibandingkan (membandingkan laporan keuangan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan atau tren posisi dan kinerja keuangan) serta dapat dipahami (harus dapat dipahami oleh para pemakai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan).

Reformasi keuangan negara yang dimulai pada tahun 2003 telah memberikan mandat yang lebih besar kepada BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hal tersebut menjadi pendorong bagi BPK untuk berkontribusi dalam memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam upaya mewujudkan tujuan negara sebagaimana dimuat dalam pembukaan UUD tahun 1945. Hal tersebut disampaikan Ketua BPK, Moermahadi Soerja Djanegara pada penyerahan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I

Tahun 2017 kepada Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) Oesman Sapta Odang pada rapat paripurna DPD di Gedung Nusantara V DPR.

IHPS I tahun 2017 merupakan ikhtisar dari 687 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang terdiri dari 113 LHP pada pemerintah pusat, 537 LHP pada pemerintah daerah, serta 37 LHP BUMN dan badan lainnya. Pada semester I tahun 2017, BPK menerbitkan 537 LHP Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016 (99%) dari 542 pemerintah daerah yang wajib menyusun laporan keuangan tahun 2016.

Terhadap 537 LKPD Tahun 2016 tersebut, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 375 LKPD (70%), Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas 139 LKPD (26%), dan Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) atas 23 LKPD (4%). Apabila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2015, LKPD yang mendapatkan opini WTP meningkat sebesar 12 persen dari 58% pada tahun 2015 menjadi 70% pada tahun 2016.



Sumber: <http://bandung.bpk.go.id/>

**Gambar 1.1 Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Jawa Barat 2011-2016**

No.	Entitas Pemda	TA 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2014	TA 2015	TA 2016
1	Prov Jawa Barat	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
2	Kab. Bandung	WDP	WDP	TMP	WDP	WDP	WTP
3	Kab. Bandung Barat	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kab. Bekasi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
5	Kab. Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
6	Kab. Ciamis	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
7	Kab. Cianjur	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
8	Kab. Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
9	Kab. Garut	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10	Kab. Indramayu	WDP	WDP	TMP	WDP	WTP	WTP
11	Kab. Karawang	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
12	Kab. Kuningan	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
13	Kab. Majalengka	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
14	Kab. Pangandaran	-	-	-	WDP	WDP	WTP
15	Kab. Purwakarta	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
16	Kab. Subang	WDP	WDP	WDP	TMP	TMP	WDP
17	Kab. Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
18	Kab. Sumedang	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
19	Kab. Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
20	Kota Bandung	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP
21	Kota Banjar	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
22	Kota Bekasi	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
23	Kota Bogor	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
24	Kota Cimahi	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	WTP
25	Kota Cirebon	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
26	Kota Depok	WTP DPP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
27	Kota Sukabumi	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
28	Kota Tasikmalaya	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP

Sumber: <http://bandung.bpk.go.id/>

### Gambar 1.2 Rekap Opini Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat Periode 2011-2016

Dari hasil tabel rekap diatas dapat dilihat bahwa Pemerintah Kota Bekasi mengalami kenaikan yang sebelumnya mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada tahun 2011-2014, kini mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yakni pada tahun 2015-2016. Kenaikan opini WTP ini menunjukkan adanya kenaikan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

(LKPD) yang didukung oleh upaya-upaya pemerintah daerah dalam melakukan perbaikan atas kelemahan yang terjadi pada tahun sebelumnya.

Beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah adalah sistem pengendalian intern dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah. Pemilihan kedua variabel tersebut didasarkan pada salah satu kriteria yang digunakan oleh BPK dalam meneliti kewajaran informasi keuangan. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP). Hasil pemeriksaan BPK menyatakan bahwa salah satu penyebab kualitas informasi laporan keuangan tidak meningkat karena belum berfungsi secara efektif sistem pengendalian intern serta lemahnya penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah pada suatu entitas tersebut.

Menurut Mulyadi (2016: 163), Sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen. Sedangkan Menurut Arens (2015:412), Pengendalian Intern merupakan proses yang dirancang untuk memberikan kepastian yang layak mengenai pencapaian tujuan manajemen dalam kategori sebagai berikut: (a) reliabilitas pelaporan keuangan; (b) efektivitas dan efisiensi operasi; (c) ketaatan kepada ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Penelitian yang dilakukan oleh Tut Madiguna Agung dan Gayatri (2018) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyoroti Sistem Pengendalian Internal (SPI) pemerintah daerah yang dinilai masih lemah. Dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I 2016 49% masalah dalam temuan BPK disebabkan lemahnya SPI. Diperlukan terobosan dalam SPI agar satuan-satuan kerja (satker) pada pemerintah daerah benar-benar bekerja dengan cara memberikan konsultasi dan pembinaan dalam setiap transaksi keuangan.

Menurut Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara, SPI yang ideal seharusnya berfungsi membina, mengawasi dan segera mengingatkan pemerintah jika ada kemungkinan pelanggaran, korupsi atau resiko dalam transaksi yang dilakukan pemerintah serta mengingatkan agar APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dapat diisi dengan orang-orang yang mempunyai kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.

Selain Sistem Pengendalian Intern untuk mengoptimalkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, saat ini digunakan alat bantu teknologi informasi yaitu Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 yang telah diperbaharui menjadi Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010 Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah

adalah sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban daerah.

Untuk menindaklanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan menyalurkan informasi keuangan kepada pelayanan publik sebagai wujud akuntabilitas atas kegiatan yang dilakukan Pemerintah, mengingat bahwa dari tahun ke tahun volume transaksi keuangan pemerintah menunjukkan kuantitas yang semakin besar, semakin rumit dan kompleks. Untuk itu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dan mendayagunakan kemajuan teknologi informasi, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah dapat memenuhi kriteria nilai informasi yang disyaratkan. (Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2010).

Penelitian yang dilakukan oleh Dewa Ayu, Nyoman Trisna dan I Gusti Ayu Purnamawati (2015) bertujuan untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang dilakukan pada SKPD di Kabupaten Jembrana. Hasil Penelitian tersebut menyatakan bahwa Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Hasil pemeriksaan BPK RI atas LKPD kabupaten di Jawa Barat menggambarkan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah masih lemahnya penerapan Sistem Informasi Akuntansi (SIA) yang terpadu dan berkesinambungan sebagai pondasi sistem pelaporan keuangan yang baik. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan dengan detail pencatatan belum dilakukan atau tidak akurat, sistem informasi akuntansi dan pelaporan tidak memadai serta sistem akuntansi dan pelaporan belum didukung SDM yang memadai pula.

Pengendalian dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan dan memperbaiki yang salah serta mengembalikan ke jalan yang benar. Pengendalian lebih ditujukan kepada kesadaran dalam diri sendiri tentang keyakinan bahwa Allah SWT selalu mengawasi setiap hal yang dilakukan. Untuk mendukung pengendalian agar berjalan dengan baik, maka setiap elemen yang terkait didalam pemerintahan memiliki ketakwaan yang tinggi kepada Allah SWT dan penetapan aturan yang tidak bertentangan dengan Syariah. Dengan demikian pengendalian dapat berjalan sebagaimana mestinya (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006). Begitu pun dengan penerapan sistem informasi akuntansi keuangan daerah harus sesuai dengan syariat Islam, dimana sistem yang digunakan sesuai dengan fungsi dan tidak melenceng dari apa yang seharusnya. Sistem informasi akuntansi bertujuan untuk menjaga aset organisasi agar dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam Islam, pertanggungjawaban itu tidak hanya di hadapan manusia saja, melainkan harus pula dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Sabda Rasulullah SAW. yang diriwayatkan oleh Tirmidzi menggambarkan



pertanggungjawaban atas aset tersebut. "Kedua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ditanya tentang empat perkara; tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia gunakan, tentang hartanya darimana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang ilmunya apa saja yang telah dia amalkan." (HR At Tirmidzi).

Dari pembahasan diatas penulis memilih untuk melakukan penelitian pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berada di Kota Bekasi. Hal ini dikarenakan pada dua tahun terakhir yakni tahun 2015-2016, Kota Bekasi berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan yang dilansir dalam Hasil Pemeriksaan LKPD Entitas di Jawa Barat setelah selama periode tahun 2011-2014 Kota Bekasi mendapatkan Opini Wajar Dengan Pengecualian. Penulis ingin mengetahui apakah Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah menjadi faktor yang berpengaruh dalam meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan tersebut sehingga Kota Bekasi mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan uraian dan penjelasan diatas, penulis akan melakukan penelitian yang berjudul : **“PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM” (Studi Kasus pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Bekasi Periode 2018).**

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Intern (SPI) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- b. Bagaimanakah Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah?
- c. Bagaimanakah Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ditinjau dari sudut pandang Islam?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh jawaban dari masalah-masalah yang dirumuskan, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern (SPI) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Untuk mengetahui pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah (SIKAD) terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- c. Untuk mengetahui pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari sudut pandang Islam.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis dalam memahami Sistem Pengendalian Intern dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah. Penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian sidang sarjana pada Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas YARSI.

b. Bagi Akademisi

Dapat dijadikan sebagai informasi atau bahan kepustakaan bagi peneliti selanjutnya dalam pengembangan penelitian di bidang Akuntansi Sektor Publik tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi sebagai variabel dependennya.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Daerah Kota Bekasi untuk dijadikan masukan dan pertimbangan guna meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.